



Sertifikasi Guru Menunggak Enam Bulan

Sertifikasi Guru Menunggak Enam Bulan

MAKASSAR, FAJAR –Ratusan guru di Makassar yang tergabung dalam Aliansi Guru Sertifikasi kecewa atas belum dibayarkannya tunjangan sertifikasi mereka selama enam bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2024.

Meskipun berbagai upaya komunikasi telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar, hingga Februari 2025 belum ada kepastian mengenai pencairan dana tersebut. Sebagai respons terhadap situasi ini, mereka berencana menggelar aksi berupa konvoi sepeda motor dan orasi di depan Kantor Wali Kota Makassar.

📖 Baca **Sertifikat...** Hlm 11

Ada keterlambatan dalam validasi data guru, sehingga SK dari Kementerian Pendidikan pun terlambat terbit. Tanpa SK itu, Kementerian Keuangan tidak bisa mentransfer dana ke daerah."

Nielma Palamba
Plh Kepala Dinas Pendidikan Makassar

📖 Lanjutkan **Halaman... 9**

Ketua Aliansi Guru Sertifikasi, Wajar Natsier Dg Sanggu, menegaskan, aksi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk perjuangan untuk menuntut hak yang seharusnya telah mereka terima sejak lama.

"Kami telah bersabar selama enam bulan, namun hingga kini belum ada kepastian. Ini adalah hak kami, bukan bantuan atau hibah. Kami menuntut kejelasan dan jaminan bahwa tunjangan sertifikasi ini akan benar-benar dibayarkan," tegas Wajar.

Plh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, Nielma Palamba mengakui, adanya keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi ini. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan juga melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat.

"Ada keterlambatan dalam validasi data guru, sehingga SK dari Kementerian Pendidikan pun terlambat terbit. Tanpa SK itu, Kementerian Keuangan tidak bisa mentransfer dana ke daerah," jelasnya.

Menurutnya, pencairan dana sertifikasi ini juga terkendala karena terlambat masuk dalam penganggaran. Namun, dia meyakinkan bahwa uang itu tetap menjadi hak guru dan pasti akan

dibayarkan. "Ibaratnya, ini tabungan mereka. Ini hak mereka, jadi pasti akan dibayar. Hanya saja memang terjadi keterlambatan," paparnya. Nielma pun menekankan, tidak semua guru mengalami ini. Hanya kisaran 200 lebih karena persoalan administrasi.

Sementara Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku, baru mengetahui adanya masalah ini. Laporan yang masuk ke dirinya sebelumnya hanya terkait dengan keterlambatan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama dua bulan bukan tunjangan

sertifikasi guru.

"Infonya belum masuk ke saya. Yang saya tahu itu PPPK yang tertunda dua bulan, dan itu pun karena kesalahan administrasi di pusat. Tapi kalau ini tunjangan sertifikasi sampai enam bulan belum dibayar, kasihan sekali. Saya baru tahu ini," ujarnya.

Dia berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. "Pasti kita urus. Apalagi kalau ini diperintahkan dari pusat, saya yakin betul akan langsung dibenahi. Kasihan kalau sampai 6 bulan belum terbayarkan," tegasnya. **(mum/ham)**